



MANAJAMEN RESIKO

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**



**Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Kabupaten Buleleng
2023**

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali								
Nama OPD		: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik								
Tahun Penilaian		: 2023								
Periode yang dinilai		: Periode RPJMD (Thun 2019-2023)								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis Pemda 1: Meningkatnya layanan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian serta statistik yang efektif dan efisien									
1,1	Sasaran 3.2.2 Terwujudnya pelayanan informasi publik sesuai standar	Nilai keterbukaan informasi publik	Menurunnya citra pemerintah daerah di mata masyarakat	RSP.23.02.23.01	Kepala Daerah	Kurangnya pemberitaan baik rilis maupun postingan di media resmi Pemkab Buleleng	Internal	C	Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait
1.1.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Informasi publik tidak tersampaikan kepada masyarakat luas	RSP.23.02.23.02	Kepala Daerah	Sarana prasarana serta media untuk penyebaran informasi belum memadai	Internal	C	Masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi terkait pemerintah daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tidak tersampaikan secara luas kepada masyarakat	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait

1,2	Sasaran 3.2.2 Terwujudnya peningkatan e-government Pemkab Buleleng sesuai dengan ketentuan	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tidak dapat diaksesnya aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik	RSP.23.02.23.03	Kepala Daerah	1. Serangan dan gangguan dari pihak luar (hacker) 2. Kualitas dan kuantitas tenaga teknis belum maksimal (Tenaga programmer) 3. Sarana Prasarana keamanan aplikasi belum memadai (Sistem keamanan aplikasi)	Eksternal	C	1. Pelayanan publik terganggu 2. Pelayanan administrasi pemerintahan tidak maksimal	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait
			Informasi publik yang disampaikan melalui Website Pemkab Buleleng tidak bisa diakses	RSP.23.02.23.04	Kepala Daerah	1. Aplikasi website mengalami masalah 2. Server website mengalami masalah 3. Domain website mengalami masalah 4. Serangan hacker	internal dan eksternal	C	1. Website tidak bisa diakses di internet 2. Informasi yang diunggah di website tidak tersampaikan	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait
			Menurunnya Indeks SPBE	RSP.23.02.23.05	Kepala Daerah	1. Kurangnya koordinasi dengan semua perangkat daerah terkait evaluasi SPBE 2. Pemahaman terkait semua indikator pertanyaan dalam kegiatan evaluasi SPBE kurang	Internal	C	1. Menurunnya kredibilitas Pemerintah Daerah 2. Mempengaruhi terkait indeks penilaian lain yang terkait SPBE misal Penilaian Reformasi Birokrasi (RB)	Kepala Daerah OPD Terkait
1.2.1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Terhambatnya seluruh layanan pemerintah berupa aplikasi online yang menggunakan jaringan internet	RSP.23.02.23.06	Kepala Daerah	Kurangnya kemampuan untuk menganalisa spesifikasi kebutuhan layanan dan kurangnya jumlah personil yang memiliki kemampuan teknis untuk penanganan gangguan jaringan internet	Internal	C	1. Gangguan jaringan yang disebabkan oleh beberapa faktor teknis tidak teratasi dengan baik 2. Layanan pemerintah yang bersifat online menjadi terhambat	OPD Terkait
			Terhambatnya akses layanan aplikasi pemerintahan yang menggunakan domain atau subdomain pemerintah	RSP.23.02.23.07	Kepala Daerah	Kurangnya tenaga teknis yang dapat melaksanakan jasa pengelolaan nama domain/ subdomain	Internal	C	1. Pengajuan subdomain dari OPD terkait tidak dapat dikonfigurasi 2. Domain/subdomain milik pemerintah yang terhubung dengan aplikasi online tidak dapat diakses	OPD Terkait

- Keterangan:
- Kolom a diisi dengan nomor urut
 - Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
 - Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
 - Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 - Kolom e diisi dengan Kode risiko
 - Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 - Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
 - Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 - Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
 - Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*
 - Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Nama OPD	: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (Tahun 2019-2023)
Tujuan Strategis	: Meningkatnya layanan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian serta statistik yang efektif dan efisien
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatnya layanan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian serta statistik yang efektif dan efisien									
	Sasaran Strategis OPD: Terwujudnya peningkatan pelayanan kebutuhan data sektoral sesuai standar	Persentase pemenuhan data sektoral Pemkab Buleleng	Terhambatnya penginputan data dari produsen	RSO.23.02 .23.01	Kepala Dinas Kominfosanti	1. Terlambatnya pengumpulan data oleh produsen data/OPD karena sering kalinya ada pergantian personil. 2. Tingkat kompetensi tenaga ASN dan Non ASN yang tidak berlatar belakang stastisi 3. Kurangnya fasilitas perangkat yang ada.	Internal	C	1. Data diolah dan dirilis/atau dipublikasikan menjadi terlambat 2. Publikasi menjadi biasa tidak bervariasi 3. Pengolahan menjadi lambat dan terkendala	Diskominfosanti, Pimpinan Pengguna data, OPD Pengguna data, masyarakat
	Program: Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
	Sasaran Strategis OPD : Terwujudnya pengamanan informasi sesuai standar	Persentase keamanan data dan informasi sesuai standar	Pengelolaan keamanan data dan informasi belum memenuhi standar	RSO.23.02 .23.02	KepalaDinas Kominfosanti	Kesadaran terhadap keamanan informasi siber masih rendah	Internal	UC	serangan siber masih terjadi	user
	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Layanan VIP dengan metode persandian (jammer) sering terkendala	RSO.23.02 .23.03	KepalaDinas Kominfosanti	Kegiatan yang melibatkan pimpinan vip menggunakan mic wirelles, wifi dan akses internet	Internal	C	kegiatan terganggu dan terkendala	Pimpinan, pemilik kegiatan
			Layanan insiden siber sistem informasi belum maksimal	RSO.23.02 .23.04	Kepala Dinas Kominfosanti	Kegiatan insiden siber berupa deface, malware, virus, dll masih belum memiliki sdm sendiri yang cukup, dan harus kolaborasi dengan bidang lain	internal	C	penanganan insiden terkesan lambat	OPD, pimpinan Dinas Kominfosanti
			Layanan Jaringan Radio Komunikasi masih belum maksimal	RSO.23.02 .23.05	Kepala Dinas Kominfosanti	Repeater yang diperlukan kurang/rusak berat	internal	C	tidak maksimalnya ketersediaan jaringan frekuensi radio komunikasi di wilayah kab buleleng	user, pimpinan

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Nama OPD	: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: 2023
Tujuan Strategis	: Terwujudnya peningkatan pelayanan kebutuhan data sektoral sesuai standar
Sasaran strategis OPD	: Terwujudnya peningkatan pelayanan kebutuhan data sektoral sesuai standar
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dokumen data sektoral Pemkab Buleleng	Pengumpulan data	Keterlambatan pengumpulan data dari produsen/OPD	ROO.23.02.23.01	Kepala Dinas Kominfosanti/Bidang Santi	Personel data mengalami pergantian	Eksternal	UC	Penerbitan dan penyebarluasan dokumen data statistik tidak tepat waktu	OPD Terkait
2	Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Pengolahan	Terkendalanya pengolahan data akibat data yang tidak tersedia sesuai jadwal	ROO.23.02.23.02	Kepala Dinas Kominfosanti/Bidang Santi	Personel yang ditunjuk mengumpulkan kembali data dari instansinya	Eksternal	UC	Penerbitan dan penyebarluasan dokumen data statistik tidak tepat waktu	OPD Terkait
3			Penyusunan	Penyusunan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal karena data belum diolah	ROO.23.02.23.03	Kepala Dinas Kominfosanti/Bidang Santi	Terlambatnya proses verifikasi dan validasi data (adanya perubahan data)	Eksternal	UC	Penerbitan dan penyebarluasan dokumen data statistik tidak tepat waktu	OPD Terkait
4			Penyebarluasan	Terlambatnya pencetakan dan penyebarluasan dokumen data sektoral	ROO.23.02.23.04	Kepala Dinas Kominfosanti/Bidang Santi	Akibat terlambatnya proses pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data	Internal	C	Penerbitan dan penyebarluasan dokumen data statistik tidak tepat waktu	Dinas Kominfosanti
5	Program : Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi	Terciptanya keamanan data dan informasi sesuai standar	Perencanaan	Kesulitan dalam pengumpulan bahan konten literasi	ROO.23.02.23.05	Kepala Dinas Kominfosanti/Bidang Santi	sumber bahan literasi belum diketahui secara jelas	Internal	C	Literasi tidak bisa disampaikan secara maksimal kepada masyarakat	OPD dan masyarakat luas
6	Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pembuatan	Literasi kurang menarik	ROO.23.02.23.06	Kepala Dinas Kominfosanti/Bidang Santi	terbatasnya sdm yang memiliki kemampuan di bidang keamanan siber	Internal	C	Tidak menimbulkan ketertarikan bagi penerima literasi	OPD dan masyarakat luas
7			Sosialisasi Penyebaran	Literasi sulit untuk dipahami	ROO.23.02.23.07	Kepala Dinas Kominfosanti/Bidang Santi	Literasi menggunakan bahasa yang awam	Internal	C	Rendahnya tingkat keamanan sesuai standar	OPD dan masyarakat luas
8	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan	Perencanaan	Perencanaan tidak sesuai dengan keadaan saat pelaksanaan	ROO.23.02.23.08	Kepala Dinas Kominfosanti/Bidang Santi	Fluktuasi harga barang yang cukup tinggi	Eksternal	C	Sulitnya menentukan nilai bangunan yang akan ditenderkan	Dinas Kominfosanti
9	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persiapan	Tidak adanya peserta lelang/ tender	ROO.23.02.23.09	Kepala Dinas Kominfosanti/Sekretariat	Nilai tender terlalu rendah sehingga tidak ada penyedia yang bersedia ikut tender	Internal	C	Pembangunan tidak dapat dilaksanakan.	Dinas Kominfosanti

10		Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan melebihi perjanjian	ROO.23.02.23.10	Kepala Dinas Kominfosanti/Sekretariat	Penyedia tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	Eksternal	UC	Pembangunan tidak selesai tepat waktu	Dinas Kominfosanti dan penyedia
11		Perawatan	Pekerjaan rusak dalam masa perawatan	ROO.23.02.23.11	Kepala Dinas Kominfosanti/Sekretariat	Kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	Internal	C	Tidak dapat dilakukan perbaikan sendiri	Dinas Kominfosanti

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : 2023			
Tujuan Strategis		: Meningkatnya layanan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian serta statistik yang efektif dan efisien			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1	Menurunnya citra pemerintah daerah di mata masyarakat	RSP.23.02.23.01	4	5	20
2	Informasi publik tidak tersampaikan kepada masyarakat luas	RSP.23.02.23.02	4	5	20
3	Tidak dapat diaksesnya aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik	RSP.23.02.23.03	5	4	20
4	Informasi publik yang disampaikan melalui Website Pemkab Buleleng tidak bisa diakses	RSP.23.02.23.04	4	3	12
5	Menurunnya Indeks SPBE	RSP.23.02.23.05	5	4	20
6	Terhambatnya seluruh layanan pemerintah berupa aplikasi online yang menggunakan jaringan internet	RSP.23.02.23.06	4	4	16
7	Terhambatnya akses layanan aplikasi pemerintahan yang menggunakan domain atau subdomain pemerintah	RSP.23.02.23.07	3	3	9
II Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kominfo					
1	Keterlambatan dalam pengumpulan data oleh Produsen Data/OPD	RSO.23.02.23.01	3	3	9
2	Pengelolaan data menjadi buku/metadana yang masih kurang	RSO.23.02.23.02	3	3	9
3	Penginputan data dari produsen data masih lambat	RSO.23.02.23.03	4	4	16
4	Pengelolaan keamanan data dan informasi masih sedang proses standarisasi	RSO.23.02.23.04	3	3	9
5	Layanan VIP dengan metode persandian (jammer) sering terkendala	RSO.23.02.23.05	2	4	8
6	Layanan insiden siber sistem informasi belum maksimal	RSO.23.02.23.06	4	4	16
7	Layanan Jaringan Radio Komunikasi masih belum maksimal	RSO.23.02.23.07	2	4	8
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kominfo					
1	Keterlambatan pengumpulan data dari produsen/OPD	ROO.23.02.23.01	3	3	9
2	Terkendalanya pengolahan data akibat data yang tidak tersedia sesuai jadwal	ROO.23.02.23.02	3	3	9
3	Penyusunan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal karena data belum diolah	ROO.23.02.23.03	3	3	9
4	Terlambatnya pencetakan dan penyebarluasan dokumen data sektoral	ROO.23.02.23.04	4	4	16
5	Dasar dari literasi yang harus jelas, tidak sebatas mitos	ROO.23.02.23.05	3	3	9
6	Literasi kurang menarik	ROO.23.02.23.06	3	3	9
7	Literasi sulit untuk dipahami	ROO.23.02.23.07	4	4	16
8	Perencanaan tidak sesuai dengan keadaan saat pelaksanaan	ROO.23.02.23.08	3	3	9
9	Tidak adanya peserta lelang/ tender	ROO.23.02.23.09	4	4	16
10	Waktu pelaksanaan melebihi perjanjian	ROO.23.02.23.10	5	4	20
11	Pekerjaan rusak dalam masa perawatan	ROO.23.02.23.11	3	3	9

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan



Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya layanan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian serta statistik yang efektif dan efisien				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Menurunnya citra pemerintah daerah di mata masyarakat	RSP.23.02.23.01	20	Kepala Daerah	Kurangnya pemberitaan baik rilis maupun postingan di media resmi Pemkab Buleleng	1. Kurangnya Rilis positif di website resmi Pemkab Buleleng 2. Kurangnya postingan positif (citra pemkab) di Media Sosial resmi Pemkab Buleleng 3. Kurangnya penyebaran rilis/berita ke media eksternal yang bekerja sama dengan Pemkab Buleleng
2	Informasi publik tidak tersampaikan kepada masyarakat luas	RSP.23.02.23.02	20	Kepala Daerah	Sarana prasarana serta media untuk penyebaran informasi belum memadai	1. Kurang masifnya penyebaran informasi publik ke masyarakat 2. Penyebaran informasi publik harus menyesuaikan dengan kultur budaya, usia penerima informasi dan beramnya platform media yang ada
3	Tidak dapat diaksesnya aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik	RSP.23.02.23.03	20	Kepala Daerah	1. Serangan dan gangguan dari pihak luar (hacker) 2. Kualitas dan kuantitas tenaga teknis belum maksimal (Tenaga programmer) 3. Sarana Prasarana keamanan aplikasi belum memadai (Sistem keamanan aplikasi)	1. Pelayanan publik terganggu 2. Pelayanan administrasi pemerintahan tidak maksimal
4	Informasi publik yang disampaikan melalui Website Pemkab Buleleng tidak bisa diakses	RSP.23.02.23.04	12	Kepala Daerah	1. Aplikasi website mengalami masalah 2. Server website mengalami masalah 3. Domain website mengalami masalah 4. Serangan hacker	1. Website tidak bisa diakses di internet 2. Informasi yang diunggah di website tidak tersampaikan
5	Menurunnya Indeks SPBE	RSP.23.02.23.05	20	Kepala Daerah	1. Kurangnya koordinasi dengan semua perangkat daerah terkait evaluasi SPBE 2. Pemahaman terkait semua indikator pertanyaan dalam kegiatan evaluasi SPBE kurang	1. Menurunnya kredibilitas Pemerintah Daerah 2. Mempengaruhi terkait indeks penilaian lain yang terkait SPBE misal Penilaian Reformasi Birokrasi (RB)
6	Terhambatnya seluruh layanan pemerintah berupa aplikasi online yang menggunakan jaringan internet	RSP.23.02.23.06	16	Kepala Daerah	Kurangnya kemampuan untuk menganalisa spesifikasi kebutuhan layanan dan kurangnya jumlah personil yang memiliki kemampuan teknis untuk penanganan gangguan jaringan internet	1. Gangguan jaringan yang disebabkan oleh beberapa faktor teknis tidak teratasi dengan baik 2. Layanan pemerintah yang bersifat online menjadi terhambat
II Risiko Strategis OPD 1						
1	Penginputan data dari produsen data masih lambat	RSO.23.02.23.03	16	Kepala Dinas Kominfosanti	Masih Kurangnya Fasilitas Perangkat yang ada	Pengolahan menjadi lambat dan terkendala
2	Layanan insiden siber sistem informasi belum maksimal	RSO.23.02.23.06	16	Kepala Dinas Kominfosanti	Kegiatan insiden siber berupa deface, malware, virus, dll masih belum memiliki sdm sendiri yang cukup, dan harus kolaborasi dengan bidang lain	penanganan insiden terkesan lambat
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kominfosanti						
1	Terlambatnya pencetakan dan penyebaran dokumen data sektoral	ROO.23.02.23.04	16	Kepala Dinas Kominfosanti/Bidang Santi	Akibat terlambatnya proses pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data	Penerbitan dan penyebaran dokumen data statistik tidak tepat waktu
2	Literasi sulit untuk dipahami	ROO.23.02.23.07	16	Kepala Dinas Kominfosanti/Bidang Santi	Literasi menggunakan bahasa yang awam	Rendahnya tingkat keamanan sesuai standar

3	Tidak adanya peserta lelang/ tender	ROO.23.02.23.09	16	Kepala Dinas Kominfosa nti/Bidang Santi	Nilai tender terlalu rendah sehingga tidak ada penyedia yang bersedia ikut tender	Pembangunan tidak dapat dilaksanakan.
4	Waktu pelaksanaan melebihi perjanjian	ROO.23.02.23.10	20	Kepala Dinas Kominfosa nti/Bidang Santi	Penyedia tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	Pembangunan tidak selesai tepat waktu

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Meningkatnya layanan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian serta statistik yang efektif dan efisien Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Menurunnya citra pemerintah daerah di mata masyarakat	RSP.23.02.23.01	Menyampaikan berita/rilis positif tentang Pemkab Buleleng	Sulitnya mendeteksi postingan yang kontra dengan pemerintah di media sosial	Melakukan pemantauan terhadap grup yang ada di media sosial kemudian mengcounter apabila ada postingan yang bernada negatif terhadap pemerintah daerah	Kepala Daerah	Tri Wulan IV 2023
2	Informasi publik tidak tersampaikan kepada masyarakat luas	RSP.23.02.23.02	Menyebarkan informasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media yang populer di masyarakat, seperti media sosial.	Informasi yang tersampaikan terkadang di sebarluaskan dengan narasi yang menyimpang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Informasi disampaikan hanya melalui akun-akun media sosial resmi Pemkab Buleleng	Kepala Daerah	Tri Wulan IV 2023
3	Tidak dapat diaksesnya aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik	RSP.23.02.23.03	Melakukan pengecekan dan maintenance terhadap aplikasi yang mengalami kendala	Masih lemahnya sarana pengamanan aplikasi dan kurangnya tenaga SDM yang memadai	Mengusulkan pengadaan sarana pengamanan aplikasi dan peningkatan kualitas SDM	Kepala Daerah	Tri Wulan IV 2023
4	Informasi publik yang disampaikan melalui Website Pemkab Buleleng tidak bisa diakses	RSP.23.02.23.04	Monitoring website secara berkala	Kurangnya tenaga teknis yang dapat melaksanakan jasa pengelolaan nama domain/ subdomain	Melakukan pembinaan dan monitoring pengelolaan website secara berkala	Kepala Daerah	Tri Wulan IV 2023
5	Menurunnya Indeks SPBE	RSP.23.02.23.05	1. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan evaluasi SPBE 2. Meningkatkan pemahaman terhadap SK Men PAN RB No. 962 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Kurangnya SDM pada internal Dinas Kominfo untuk membantu pengumpulan data terkait evaluasi SPBE	Recruitmen tenaga baru maupun lebih mengoptimalkan SDM yang ada	Kepala Daerah	Tri Wulan IV 2023
6	Terhambatnya seluruh layanan pemerintah berupa aplikasi online yang menggunakan jaringan internet	RSP.23.02.23.06	Menyediakan Back up internet, melakukan monitoring secara berkala	Kurangnya kemampuan untuk menganalisa spesifikasi kebutuhan layanan dan kurangnya jumlah personil yang memiliki kemampuan teknis untuk penanganan gangguan jaringan internet	Melakukan recruitmen tenaga ahli dan melakukan pelatihan teknis tenaga jaringan	Kepala Daerah	Tri Wulan III 2023
II Risiko Strategis Dinas Kominfo							
1	Penginputan data dari produsen data masih lambat	RSO.23.02.23.03	Permintaan data kepada produsen melalui link excel spreadsheet	link excel spreadsheet dapat di akses oleh semua orang	Memberikan hak akses hanya kepada pemilik link akses excel spreadsheet	Kepala Dinas Kominfo	Tri Wulan III 2023
2	Layanan insiden siber sistem informasi belum maksimal	RSO.23.02.23.06	Melakukan pengecekan terhadap sistem/perangkat yang terkena insiden bersama tenaga ahli/programmer	Masih kurangnya tenaga/SDM yang dapat menangani insiden siber	Melakukan koordinasi dan pelaporan ke BSSN RI	Kepala Dinas Kominfo	Tri Wulan II 2023
III Risiko Operasional Dinas Kominfo							
1	Terlambatnya pencetakan dan penyebaran dokumen data sektoral	ROO.23.02.23.04	Permintaan data kepada produsen melalui link excel spreadsheet	link excel spreadsheet dapat di akses oleh semua orang	Memberikan hak akses hanya kepada pemilik link akses excel spreadsheet	Kepala Dinas Kominfo	Tri Wulan III 2023
2	Literasi sulit untuk dipahami	ROO.23.02.23.07	Memperbanyak sumber-sumber bahan literasi	Literasi yang disampaikan dengan bahasa yang masih sulit dipahami dan dengan konsep judul sehingga kurang menarik	Membuat literasi yang lebih menarik dan mudah dimengerti dengan menggunakan video dan animasi	Kepala Dinas Kominfo	Tri Wulan III 2023
3	Tidak adanya peserta lelang/ tender	ROO.23.02.23.09	Melakukan tender ulang dengan RAB yang disesuaikan	Waktu tender menjadi lebih panjang sehingga waktu pelaksanaan menjadi lebih lama.	Berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kab Buleleng untuk menyiapkan dokumen pengadaan yang tepat dan realistis dengan situasi dan kondisi saat ini	Kepala Dinas Kominfo	Tri Wulan II 2023
4	Waktu pelaksanaan melebihi perjanjian	ROO.23.02.23.10	Melakukan adendum kontrak dengan penyedia untuk memberikan waktu tambahan jika penyedia meminta perpanjangan waktu.	Jika waktu tambahan melebihi tahun anggaran, maka akan menyebabkan pembayaran yang tidak tuntas pada tahun berjalan atau terjadi silpa tahun 2023.	Memberikan waktu tambahan kepada penyedia setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan Pembangunan Gedung Kantor Tahap 2 Dinas Kominfo Kab. Buleleng	Kepala Dinas Kominfo	Tri Wulan IV 2023

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Meningkatkan layanan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian serta statistik yang efektif dan efisien
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1	Menurunnya citra pemerintah daerah di mata masyarakat	RSP.23.02.23.01	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Telah dilaksanakannya pengelolaan komunikasi publik resmi Pemkab Buleleng secara berkelanjutan	Triwulan IV	Oct-23	Telah dilakanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
2	Informasi publik tidak tersampaikan kepada masyarakat luas	RSP.23.02.23.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Telah dilaksanakannya penyebaran informasi secara berkelanjutan melalui semua kanal/media resmi milik Pemkab Buleleng, baik secara konvensional maupun digital	Triwulan IV	Nov-23	Telah dilakanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
3	Tidak dapat diaksesnya aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik	RSP.23.02.23.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Monitoring aplikasi	12 bulan	Januari s/d Desember 2023	Telah dilakanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
4	Informasi publik yang disampaikan melalui Website Pemkab Buleleng tidak bisa diakses	RSP.23.02.23.04	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Monitoring website Resmi Pemkab Buleleng	Triwulan 2	April	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti
5	Menurunnya Indeks SPBE	RSP.23.02.23.05	tidak terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE di tahun 2023	Triwulan II	Juli 2023	Telah dilakanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur

6	Terhambatnya seluruh layanan pemerintah berupa aplikasi online yang menggunakan jaringan internet	RSP.23.02.23.06	03-Oct-23	Adanya gangguan jalur internet dari Penyedia	Jaringan internet mengalami kendala di seluruh SKPD	Terhambatnya layanan pemerintah berupa aplikasi online	Kontroling dan konfigurasi backup internet secara berkala	Triwulan IV	Oct-23	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
II Risiko Strategis Dinas										
1	Penginputan data dari produsen data masih lambat	RSO.23.02.23.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Mengadakan verifikasi validasi dan sekaligus pemantapan penginputan ke aplikasi Portal Satu Data	Triwulan IV	18 September 2023	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
2	Layanan insiden siber sistem informasi belum maksimal	RSO.23.02.23.06	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melaksanakan monitoring Keamanan Siber ke seluruh OPD	Triwulan II	Maret - Juli 2023	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti

III Risiko Operasional Dinas

1	Terlambatnya pencetakan dan penyebarluasan dokumen data sektoral	ROO.23.02.23.04	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Proses Penyusunan Buku sudah selesai	Triwulan IV	Nov-23	Proses tindaklanjut
2	Literasi sulit untuk dipahami	ROO.23.02.23.07	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Terus berupaya dengan literasi masif dan terus-menerus, dengan desain yang mudah dipahami	Setiap Minggu	2023	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
3	Tidak adanya peserta lelang/ tender	ROO.23.02.23.09	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kab Buleleng untuk menyiapkan dokumen pengadaan yang tepat dan realistis dengan situasi dan kondisi saat ini	Triwulan II	2023	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
4	Waktu pelaksanaan melebihi perjanjian	ROO.23.02.23.10	Terjadi	Terjadi	Terjadi	Terjadi	Memberikan waktu tambahan kepada penyedia setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan Pembangunan Gedung Kantor Tahap 2 Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng	Desember 2023	Desember 2023	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara